

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2016 terjadi kasus penculikan WNI di Filipina Selatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf sendiri tergolong kelompok teroris. Hal ini dikarenakan aksi-aksi kejahatan transnasional yang sudah sering dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf seperti, melakukan pengeboman, pembajakan kapal hingga penculikan warga negara asing dan sipil. Kasus penculikan yang menimpa WNI ini bukan yang pertama kalinya. Di tahun 2005, WNI pernah menjadi korban penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf. Penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut bertujuan agar pemerintah dari negara asal korban memberikan uang tebusan sebagai syarat pembebasan sandera

Pada upaya pembebasan sandera WNI di tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutus Benny Mamoto sebagai negosiator untuk membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Negosiasi yang dijalankan sifatnya tertutup. Yang dimaksudkan untuk menjaga komunikasi agar pihak keluarga maupun perusahaan tidak dapat menjalin kontak dengan kelompok Abu Sayyaf. Aktor yang terlibat dalam upaya pembebasan WNI ini hanya sedikit, jadi hanya antara pemerintah Indonesia dibantu dengan

pemerintah Filipina saja dan negosiasinya langsung dengan kelompok Abu Sayyaf.

Sedangkan, proses pembebasan sandera WNI di tahun 2016 dapat dikatakan sangat berbeda dengan sebelumnya, walaupun tetap menggunakan *soft power* sebagai langkah utamanya. Perbedaannya ada pada aktor yang terlibat dalam upaya pembebasan tersebut. Ada tiga tim negosiator yang terlibat dalam proses pembebasan sandera di Filipina. Ketiga tim negosiator tersebut berada dibawah koordinasi Kementerian luar Negeri. Tim negosiator yang dibentuk pun tidak hanya berasal dari kalangan instansi pemerintah saja namun ada NGO dan aktor-non negara baik dari Indonesia maupun dari Filipina yang ikut andil. Pemilihan studi kasus ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut karena masih banyak penelitian terkait studi kasus yang sama tidak membahas secara lengkap terkait rumusan masalah “*bagaimana upaya soft power Indonesia dalam membebaskan sandera Abu Sayyaf pada 2016 ?*”

Indonesia mengandalkan *soft power* sebagai langkah utamanya karena penggunaan *hard power* seperti dengan invasi militer akan meimbulkan resiko terhadap keselamatan sandera, anggota militer maupun warga sipil. *Soft power* merupakan suatu cara lain yang digunakan untuk mencapai kepentingan tanpa memberikan ancaman atau paksaan. Cara kerja dari *soft power* ini yaitu suatu negara harus mampu mengubah preferensi pihak lain seolah pilihan dari pihak tersebut terlihat tidak realistis.

Dalam menjalankan *soft power* ini, ada *behaviors* yang dilakukan seperti melakukan *agenda setting* dan *attraction* untuk mencapai *co-optive power*.

Behaviors tersebut bertumpu pada sumber daya *soft power*. *Agenda setting* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan menjalin diplomasi dengan pemerintah Filipina dan bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Kemudian, pemerintah Indonesia memberikan *attraction* melalui tim dari Yayasan Sukma yang memberikan beasiswa pendidikan yang diperuntukkan kepada anak-anak muda dari kelompok Abu Sayyaf dan juga pemberian 40 buah Al-Qu'ran sebagai salah satu bentuk penggantian ransum yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf.

Keberhasilan dari *soft power* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf bergantung pada sumber daya *soft power* yang dimiliki Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Nye bahwa *soft power* bergantung pada tiga sumber utama yaitu: *culture, value, policy*. Pemerintah Indonesia kemudian menggunakan sumber daya tersebut dalam upayanya membebaskan korban sandera.

Pertama, *culture*. Ada kesamaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan Filipina Selatan yaitu masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Pemerintah Indonesia kemudian melibatkan tokoh agama dalam proses negosiasi. Dengan adanya persamaan budaya tersebut mempermudah pemerintah Indonesia untuk meyakinkan kelompok Abu Sayyaf bahwa ada hubungan baik antara muslim Indonesia-Filipina sehingga kelompok Abu Sayyaf setuju dengan penggantian ransum yang diajukan oleh tim negosiator

Kedua, *political value*. Suatu nilai-nilai politik yang dimiliki oleh sebuah negara yang dapat berlaku di dalam maupun di luar negeri. Nilai-nilai politik tersebut juga harus memiliki kepentingan bersama di dalamnya. Negara juga harus

mampu mendominasi aturan-aturan internasional untuk memaksimalkan *political values* nya. Dalam studi kasus ini, pemerintah Indonesia memang tidak mampu mendominasi aturan internasional seperti yang dijelaskan Nye mengenai *political values* karena adanya benturan kekuasaan antara Indonesia dan Filipina.

Filipina merupakan negara yang berdaulat. Oleh sebab itu, ketika pemerintah Indonesia ingin melakukan invasi militer untuk membebaskan WNI langkah tersebut tidak dapat dijalankan karena pemerintah Filipina memiliki aturan sendiri untuk tidak memperbolehkan adanya militer asing masuk ke wilayah Filipina. Meskipun, sudah ada beberapa kerja sama, perjanjian antara Indonesia – Filipina mengenai kerja sama dalam bidang militer. Namun, nyatanya tidak cukup untuk pemerintah Indonesia melakukan invasi militer. Akan tetapi, pemerintah Filipina megizinkan Indonesia untuk melibatkan TNI sebagai asistensi dalam upaya pembebasan tersebut.

Ketiga, *foreign policy*, sama halnya seperti *poitical values*, suatu kebijakan haruslah mendapat legitimasinya di mata internasional dan apabila kebijakan tersebut dapat merugikan pihak lainnya maka *foreign policy* tersebut dianggap gagal. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan “*No Ransom Policy*” yang mana merupakan kebijakan untuk tidak membayarkan ransum kepada kelompok teroris walaupun menyangkut keselamatan WNI. Oleh karena itu, pmerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dengan cara melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf sebagai bentuk implementasi dari kebijakan *soft power* Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyanderaan WNI tersebut.

Kemudian adanya pengaruh politik yang dimiliki sebuah negara juga menjadi potensi dari keberhasilan *soft power*. Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dalam upaya pembebasan WNI juga dikarenakan adanya pengaruh politik yang dimiliki oleh Indonesia terhadap Filipina. Seperti apa yang dinyatakan oleh Nye bahwa tidak semua negara dapat menggunakan *hard power* nya kepada negara lain, karena ada negara-negara yang lebih tertarik dengan politik tingkat rendah yaitu *soft power*.

Dengan menggunakan konsep *soft power* ini, Indonesia tidak sepenuhnya berhasil membebaskan sandera WNI dari kelompok Abu Sayyaf dengan menggunakan *soft power* nya sebagai langkah utamanya. Meskipun memang pemerintah Indonesia mampu melancarkan *agenda setting* dan memberikan *attraction* nya sehingga diplomasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia – Filipina dan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf tanpa melakukan pembayaran tebusan.

Upaya *soft power* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut tidak dapat dikatakan murni *soft power* dikarenakan masih ada unsur *hard power* dalam upaya pembebasan tersebut sebab adanya pembayaran tebusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut diluar koordinasi dari pemerintah Indonesia yang justru dapat memberikan celah kepada kelompok Abu Sayyaf untuk memaksa ataupun mengancam pihak keluarga maupun perusahaan agar memberikan uang tebusan.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis dalam BAB Penutup ini, yang menyatakan bahwa kebijakan *soft power* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Pemanfaatan dari tiga sumber utama *soft power* yang dikemukakan oleh Nye terbukti dapat meminimalisir potensi kegagalan dari upaya pembebasan WNI di tahun 2016. Penulis akan memberikan beberapa rekomendasi terkait penelitian terhadap studi kasus.

Pertama, kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait rumusan masalah yang sama, agar disarankan untuk mencari data dengan melakukan penelitian lapangan mengenai proses pembebasan WNI di Filipina pada tahun 2005 karena adanya keterbatasan data yang penulis temui pada saat melakukan penelitian ini. Sehingga nantinya dalam melakukan penelitian selanjutnya data yang dihasilkan akan seimbang antara kebijakan *soft power* yang dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005 dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

Kedua, penelitian lapangan juga diperlukan dalam mencari data mengenai pembayaran ransom yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar data yang didapatkan lebih valid. Karena masih ada kontradiksi antar pihak dari Filipina yang menyampaikan bahwa tidak mungkin kalau kelompok Abu Sayyaf membebaskan sandernya tanpa bayaran apapun.